



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran No. 74 Marabahan 70513

Telp. (0511) 6701166 Fax. 0511 6701255 E-mail :

diskominfo@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 188.45/047/DISKOMINFO/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR RESIKO HASIL ANALISA MANAJEMEN RESIKO
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi dan nepotisme, diperlukan penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di Dinas Komunikasi Kabupaten Barito Kuala;
- b. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perlunya analisis Manajemen resiko dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Daftar Hasil Analisa Manajemen Resiko di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
12. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah No 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan istem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Barito Kuala

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Analisa Manajemen Resiko sebagai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024
- KEDUA** : Hasil Analisa Manajemen Resiko sebagai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 digunakan sebagai pengendalian resiko untuk pencapaian tujuan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 13 Januari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**



HERY SASMITA, S.STP. M.AP
NIP. 19840220 200312 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR : 188.45/ 047 /DISKOMINFO/2025
 TANGGAL : 13 JANUARI 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR HASIL ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

No	Tujuan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Analisis Risiko			Dampak
				Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b		c	d	e	f=dxe	
1	Tujuan Strategis 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi						
	Sasaran Strategis : Meningkatkan informasi dan komunikasi Pemerintah yang dipublikasikan						
		Tidak terpenuhinya kebutuhan konten informasi sesuai dengan perkembangan teknologi dalam hal pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	ROS.DISKOMINF.1.T1	4	4	16	Hampir Pasti
		Kemampuan Peliputan dan Editing pada bidang IKP masih rendah, baik dalam pembuatan berita maupun cara pengambilan gambarnya	ROS.DISKOMINF.2.T1	4	4	16	Hampir Pasti
		Tidak sampainya informasi Pemerintah kepada masyarakat	ROS.DISKOMINF.3.T1	4	4	16	Hampir Pasti
		Rendahnya Respond Admin SP4N Lapor untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat	ROS.DISKOMINF.4.T1	4	2	8	Kemungkinan Besar
		Tidak tercapainya target permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan melalui SP4N Lapor	ROS.DISKOMINF.5.T1	4	4	16	Hampir Pasti
2	Tujuan Strategis : Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE						
	Sasaran Strategis : Meningkatkan Pelaksanaan pengelolaan SPBE						
		gangguan jaringan internet layanan egovernment	ROS.DISKOMINF.1.T2	4	3	12	Kemungkinan Besar
		pembangunan dan pengembangan aplikasi tidak sesuai target	ROS.DISKOMINF.2.T2	4	4	16	Hampir Pasti
		tidak maksimalnya penerapan SPBE	ROS.DISKOMINF.3.T2	4	4	16	Hampir Pasti

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Analisis Risiko			Dampak
				Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c		d	e	f=dxe	
1	Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika						
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Tidak teraktivasi akun Pusat Data Nasional	ROO.DISKOMINFO-EGOV.07	4	3	12	Kemungkinan Besar
	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	pembangunan dan pengembangan aplikasi tidak sesuai target	ROO.DISKOMINFO-EGOV.08	4	4	16	Hampir Pasti

		kegagalan pengembangan sistem	ROO.DISKOMINFO-EGOV.09	3	3	9	Kemungkinan Besar
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	tidak maksimalnya penerapan SPBE	ROO.DISKOMINFO-EGOV.10	4	4	16	Hampir Pasti
		penyusunan regulasi/dokumen berkaitan SPBE tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku	ROO.DISKOMINFO-EGOV.11	3	3	9	Kemungkinan Besar
		penyusunan regulasi/dokumen berkaitan SPBE tidak sesuai target	ROO.DISKOMINFO-EGOV.12	3	4	12	Hampir Pasti
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Gangguan Domain (www.baritokualakab.go.id)	ROO.DISKOMINFO-EGOV.01	3	3	9	Kemungkinan Besar
		Gangguan hosting	ROO.DISKOMINFO-EGOV.02	4	3	12	Kemungkinan Besar
		gangguan website pemkab barito kuala	ROO.DISKOMINFO-EGOV.03	4	4	16	Hampir Pasti
		Gangguan jaringan internet pemerintah	ROO.DISKOMINFO-EGOV.04	4	3	12	Kemungkinan Besar
		peralatan jaringan layanan egovernment mengalami kerusakan	ROO.DISKOMINFO-EGOV.05	4	4	16	Hampir Pasti
		tidak terpantaunya kerusakan jaringan egovernment	ROO.DISKOMINFO-EGOV.06	3	3	9	Kemungkinan Besar
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKAS PUBLIK						
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten	Tidak terpenuhinya kebutuhan konten informasi sesuai dengan perkembangan teknologi dalam hal pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	ROO.DISKOMINFO-IKP.1	4	4	16	Hampir Pasti
		Masyarakat tidak tertarik untuk melihat bahkan membaca informasi yang disampaikan	ROO.DISKOMINFO-IKP.1	3	2	6	Kemungkinan kecil
		Kemampuan Peliputan dan Editing pada bidang IKP masih rendah, baik dalam pembuatan berita maupun cara pengambilan gambarnya	ROO.DISKOMINFO-IKP.1	4	3	12	Kemungkinan Besar
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi publik	Belum optimalnya Berita/konten yang di hasilkan melalui pengelolaan Media Komunikasi Publik	ROO.DISKOMINFO-IKP.2	4	4	16	Hampir Pasti
		Adanya gangguan terhadap media komunikasi publik seperti sering errornya layar monitor pada media vidiotron, website tidak bisa dibuka	ROO.DISKOMINFO-IKP.2	3	3	9	Kemungkinan Besar
		Tidak sampainya informasi Pemerintah kepada masyarakat	ROO.DISKOMINFO-IKP.2	4	4	16	Hampir Pasti
		Serangan HEAKER terhadap media komunikasi publik	ROO.DISKOMINFO-IKP.2	3	2	6	Kemungkinan kecil
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rendahnya Respond Admin SP4N Lapor untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat	ROO.DISKOMINFO-IKP.3	4	2	8	Kemungkinan kecil
		Tidak tercapainya target permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan melalui SP4N Lapor	ROO.DISKOMINFO-IKP.3	4	4	16	Kemungkinan kecil
		Tidak semua admin SP4N Lapor memahami cara penanganan tindak lanjut pengaduan oleh masyarakat	ROO.DISKOMINFO-IKP.3	2	2	4	Kemungkinan kecil
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik tidak memadai	ROO.DISKOMINFO-IKP.4	3	3	9	Kemungkinan Besar
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Proses pengumpulan data untuk penyusunan Buku Statistik Sektoral melampaui batas waktu yang ditentukan	ROO.KOMINFO-SP.1	3	3	9	Hampir Pasti
		Data untuk penyusunan Buku Statistik Sektoral kurang valid	ROO.KOMINFO-SP.2	4	3	12	Sedang dan Tinggi
		Kesalahan dalam penentuan metode pengolahan data	ROO.KOMINFO-SP.3	4	4	16	Hampir Pasti
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tidak maksimalnya data yang akan di metadatkan	ROO.KOMINFO-SP.6	3	3	9	Kemungkinan Besar
		Data yang dimetadatkan tidak sesuai format	ROO.KOMINFO-SP.7	4	4	16	Hampir Pasti
		SDM Pengelola data yang sering berganti-ganti	ROO.KOMINFO-SP.8	4	3	12	Kemungkinan Besar
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
1	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sangat minimnya operasionalisasi pada proses pelaksanaan	ROO.KOMINFO-SP.9	4	4	16	Kemungkinan Besar
		Sarana dan prasarana penunjang belum tersedia	ROO.KOMINFO-SP.11	3	3	9	Kemungkinan Besar
		SDM Pengelola Persandian dan Pengamanan Informasi tidak kompeten	ROO.KOMINFO-SP.12	4	3	12	Kemungkinan Besar

2	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan yang tersedia sangat minim	ROO.KOMINFO-SP.13	4	4	16	Hampir Pasti
		Belum ada SDM yang kompeten	ROO.KOMINFO-SP.14	3	3	9	Kemungkinan Besar
		Penyebarluasan pengetahuan keamanan informasi tidak maksimal	ROO.KOMINFO-SP.15	4	3	12	Kemungkinan Besar



Marabahan, 13 Januari 2025
 Kepala Dinas komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Barito Kuala

HERY SASMITA, S.STP., M.AP.
 NIP. 19840220 200312 1 001